



KERJA INOVATIF MANDIRI PANGAN

DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

KERJA INOVATIF MANDIRI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
TAHUN 2025



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, 12920

Phone
(021) 50927413

Email & Online
Email: dit.peppd@bappenas.go.id

 [dit.peppdbappenas](https://www.instagram.com/dit.peppdbappenas)

 [Direktorat PEPPD](https://www.youtube.com/DirektoratPEPPD)

 peppd.bappenas.go.id

ISBN 978-634-7023-01-8



9

786347

023018



KERJA INOVATIF MANDIRI PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

Perpustakaan Nasional RI. Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Judul dan Penanggung Jawab:	Kerja Inovatif Mandiri Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau / penulis, Yudhie Hadmadji Sudjarwo, Cucu Suryaman, Ramdan Febrian Arifin, Sandya Ridha Utama, Irfan Madani
Edisi:	Cetakan pertama, Januari 2025
Deskripsi Fisik:	60 halaman : ilustrasi, foto; 15 cm
Identifikasi:	ISBN 978-634-7023-01-8 E-ISBN 978-634-7023-02-5 (PDF)
Subjek:	Ketahanan pangan
Klasifikasi:	363.192 [23]
Perpusnas ID:	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1181552

Pengarah:

Erwin Dimas, Deputi Bidang PEPP

Penanggungjawab:

Rohmad Supriyadi, Direktur PEPPD

Penulis:

Yudhie Hadmadji Sudjarwo
Cucu Suryaman
Ramdan Febrian Arifin
Sandya Ridha Utama
Irfan Madani

Pemerintah Daerah:

Drh. Suparmi – Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan
Zulfahmi, S.Pi, M.Si – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

Diterbitkan Oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Tahun 2025

SAMBUTAN

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabarrakatuh, Salam Sejahtera,
Salam Kebajikan, Rahayu.

Kerja inovatif daerah merupakan bukti nyata bahwa perencanaan, penganggaran pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. Kerja inovatif merupakan terobosan perencanaan pembangunan berbasis bukti yang didukung dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat dilaksanakan, dimonitor dan dikendalikan dalam pelaksanaannya. Kerja inovatif lahir di suatu daerah karena mengetahui ada masalah dan memahami bagaimana cara menyelesaikan masalahnya.

Peternakan itik di Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 didasari adanya potensi punahnya jenis itik Alabio (paruh kuning) dan adanya kebutuhan pasar yang sangat tinggi. Untuk menjaga kepunahan dilakukan pemurnian jenis itik alabio dan pengembangan jenis itik pedaging dan petelur untuk memenuhi kebutuhan pasar. kerja inovatif Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan mengembangkan sistem integrasi hulu-hilir ternak itik dilahan rawa dan lahan kering (Siti Hawa Lari). Sedangkan budidaya ikan patin di Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah adanya potensi air dan jenis ikan patin yang cocok untuk dibudidayakan di daerah tersebut. Kerja inovatif Kabupaten Kampar adalah konsep minimal satu rumah satu kolam ikan patin dan dikelola dan diolah hulu hilirnya secara berkelompok.

Kerja inovatif di Provinsi Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Kampar telah memenuhi kriteria inovasi dan praktik baik yang dapat diadaptasi dan direplikasi oleh daerah lain. Kerja Inovatif adalah bukti nyata bahwa daerah mengetahui permasalahan, mencari solusi, dan membuat terobosan perencanaan pembangunan yang terstruktur. Terobosan pembangunan dilakukan melalui riset, metode yang sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta, Oktober 2024

Erwin Dimas

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan buku Kerja Inovatif Mandiri Pangan telah selesai dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah selesai.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk mempromosikan praktik-praktik baik inovasi daerah sebagai terobosan perencanaan pembangunan daerah. Kerja Inovatif didasarkan pada penemuan ide serta gagasan baru dalam menyelesaikan permasalahan, dan menjadi dasar dalam kebijakan perencanaan pembangunan. Penyusunan buku kerja inovatif adalah hasil kolaboratif pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat, pelaku usaha dan akademisi.

Penulisan buku kerja inovatif menggunakan pendekatan, metode, serta kriteria inovasi agar mudah dilakukan replikasi atau adaptasi, baik pada tataran konsep, proses dan mekanisme, atau pada pelaksanaan inovasi. Adapun kriteria yang dikembangkan adalah inovasi, kelayakan, partisipatif, mudah direplikasi, dapat dipertanggungjawabkan, berkelanjutan, berdampak, dan pro-gender.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, mitra pembangunan, masyarakat, dan akademisi. Bagi daerah yang memiliki kesamaan masalah dan potensi serta tertarik untuk melakukan replikasi atau adaptasi kerja inovatif, kami terbuka untuk memfasilitasinya.

Jakarta, Oktober 2024

Rohmad Supriyadi

Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR SINGKATAN

Bagian I Pendahuluan

- A. Kerja Inovatif Pembangunan Daerah
- B. Pendekatan dan Metode
- C. Kriteria Kerja Inovatif

Bagian II Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari)

- A. Tantangan dan Solusi
- B. Kunci Sukses
- C. Mengapa Siti Hawa Lari

Bagian III Panduan Replikasi Inovasi Siti Hawa Lari

- A. Tahapan Perencanaan
- B. Perencanaan Teknis
- C. Tahapan Perencanaan Kelembagaan
- D. Tahapan Operasional
- E. Monitoring & Evaluasi
- F. Dukungan Regulasi
- G. Alokasi & Pembiayaan

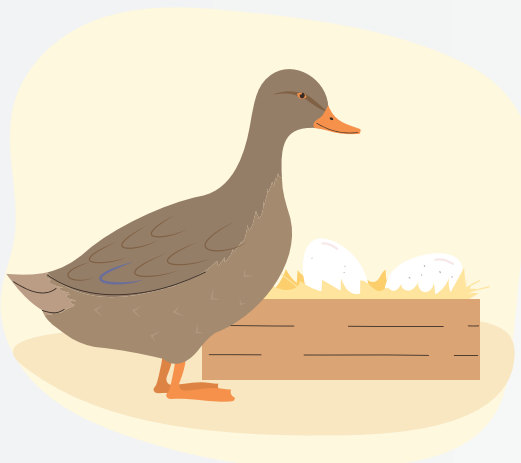
Bagian IV Budidaya Ikan Patin

- A. Tantangan dan Solusi
- B. Kunci Sukses
- C. Mengapa Kampung Patin

Bagian V Panduan Replikasi Inovasi Budidaya Ikan Patin

- A. Tahapan Perencanaan
- B. Perencanaan Teknis
- C. Perencanaan Kelembagaan
- D. Tahapan Operasional
- E. Dukungan Regulasi
- F. Alokasi dan Sumber Pembiayaan

Bagian VI Penutup

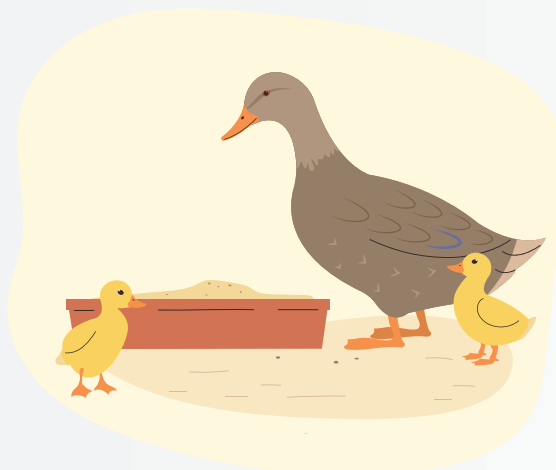


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Kelompok peternak itik (Klaster) Jaya Bersama di Desa Manang Baru, Kecamatan Las, Kab. Hulu Sungai Tengah.
- Gambar 2.** Alur proses pembentukan Inovasi Siti Hawa Lari Kalimantan Selatan
- Gambar 3.** FGD penulisan buku Kerja Inovatif Mandiri Pangan antara Bappenas dan Pemprov Kalsel
- Gambar 4.** Faktor utama pendukung keberhasilan Siti Hawa Lari
- Gambar 5.** Alur implementasi Inovasi Siti Hawa Lari
- Gambar 6.** Peternak itik petelur klaster Jaya Bersama
- Gambar 7.** Pengelolaan kandang itik
- Gambar 8.** Pengembangan itik petelur model *closed loop*
- Gambar 9.** Pengembangan itik pedaging model *closed loop*
- Gambar 10.** Pengolahan ikan asap produk turunan ikan patin
- Gambar 11.** Produk turunan ikan patin berupa *fillet* ikan
- Gambar 12.** Warga Desa Koto Masjid sedang mengolah produk turunan ikan patin
- Gambar 13.** Alur proses pembentukan Program Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin Kampar
- Gambar 14.** Alur proses teknis budidaya ikan patin

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Alokasi anggaran Inovasi Siti Hawa Lari pada tahun 2021–2024
- Tabel 2.** Data kelompok budidaya ikan patin Desa Koto Masjid
- Tabel 3.** Data produksi budidaya ikan patin Desa Koto Masjid
- Tabel 4.** Data rangkuman produksi kelompok budidaya ikan patin Desa Koto Masjid
- Tabel 5.** Data pakan budidaya ikan patin Desa Koto Masjid



BAGIAN I PENDAHULUAN



A. KERJA INOVATIF PEMBANGUNAN DAERAH

Mandiri pangan merupakan upaya sinergi antara Pemerintah dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Dalam hal ini Pemerintah mengajak, mendampingi, dan memfasilitasi serta mendorong masyarakat agar terus berkontribusi serta mampu membangun kerja inovatif kemandirian pangan di daerah masing-masing.

Kementerian PPN/Bappenas mengangkat tema mandiri pangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai salah satu provinsi terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024. Kalsel telah berinovasi secara spesifik untuk mengatasi isu pangan sejak tahun 2021. Serupa dengan Kalsel, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau juga telah menjalankan program ketahanan pangan berkelanjutan sebagai kampung komoditas ikan patin.

Kerja inovatif Provinsi Kalimantan Selatan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota, dilakukan untuk menjaga kestabilan pangan di masyarakat melalui program peternakan itik. Pola yang dikembangkan adalah klusterisasi kelompok peternak yang berbeda di setiap daerah, di antaranya kluster pembesaran itik, kluster itik pedaging, kluster itik petelur, kluster pembuatan pakan, dan kluster pemurnian itik Alabio. Kerja inovatif tersebut adalah Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari) yang dikembangkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan. Program ini telah berhasil mendorong masyarakat peternak untuk menjadi pengusaha itik yang berkelanjutan dari hulu dan hilir.

Kerja Inovatif di Kabupaten Kampar adalah integrasi hulu-hilir budidaya ikan patin dengan konsep minimal satu rumah satu kolam ikan patin. Budidaya ikan patin didukung dan difasilitasi oleh Dinas Perikanan baik dalam pembenihan,



pembesaran, pembuatan pakan, hingga hilirisasi dan konsep usahanya. Keberhasilan pendampingan dari Dinas Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat membantu para pembudidaya untuk meningkatkan produktivitas memenuhi persyaratan standar kualitas untuk kemajuan usahanya.

B. PENDEKATAN DAN METODE

Pendekatan

Pendekatan sebuah inovasi harus memberikan dampak terhadap sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan ini digunakan dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan inovasi yang berbasis bukti dan berkelanjutan.

Pendekatan di atas disusun dengan konsep pentahelix yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inovasi pembangunan dihadapkan pada situasi dan kondisi permasalahan daerah yang melibatkan yang melibatkan sosial budaya dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Inovasi dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi dan menyelesaikan permasalahan daerah di antaranya pengentasan kemiskinan, penanganan *stunting*, akses lapangan kerja, dan peluang pendapatan bagi masyarakat.
3. Inovasi yang dilakukan harus memperhatikan dampak lingkungan serta memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan bertanggung jawab.



Metode

Metode penyusunan buku ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan memanfaatkan studi literatur

(laporan kegiatan, media, dan buku). Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, diverifikasi, dan dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) pemilik inovasi.

C. KRITERIA KERJA INOVATIF

Terdapat tujuh kriteria yang digunakan untuk menilai inovasi pembangunan daerah. Kriteria-kriteria tersebut telah dikembangkan dalam buku Kerja Inovatif Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan Jawa Barat (2023 sebagai tindak lanjut provinsi terbaik PPD 2023. Tujuh kriteria kerja inovatif adalah sebagai berikut:

Innovation: inovasi merupakan inisiatif baru atau upaya adaptasi terhadap *input*, proses dan *output* dari terobosan pembangunan sebelumnya. Kriteria-kriteria inovasi adalah: (1) merupakan solusi baru atau adaptasi untuk menyelesaikan masalah, (2) inovasi tercipta melalui penelitian awal untuk memahami kondisi faktual masyarakat setempat.

Feasibility: inovasi yang dikembangkan dianggap layak secara kelembagaan, mekanisme, proses, dan pendanaan.

Kriteria-kriteria *feasibility* adalah: (1) pelaksanaan inovasi harus memiliki struktur kelembagaan organisasi pelaksanaan inovasi yang jelas sesuai dengan kaidah umum organisasi pelayanan masyarakat, (2) memiliki tahap pelaksanaan yang jelas yang didukung dengan adanya dokumen dan panduan, (3) mekanisme pembiayaan atau alternatif pembiayaan mudah ditiru.

Participatory: inovasi bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kriteria-kriteria *participatory* adalah: (1) memiliki mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, (2) memiliki tanggung jawab bersama atas inovasi yang dibangun, (3) sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, komunitas dan bisnis dalam menjalankan program inovasi.



Replicability: inovasi mudah untuk direplikasi atau diadaptasi oleh daerah lain baik secara keseluruhan atau parsial. Kriteria replicability adalah: (1) inovasi terpenuhi kriteria replikasi yang telah ditetapkan, (2) inovasi dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, (3) adanya dokumen pendukung dan panduan untuk memudahkan daerah lain mereplikasi.

Accountability: inovasi harus memiliki bentuk pertanggungjawaban baik proses perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi. Kriteria *accountability* yaitu (1) dokumen perencanaan dan laporan kegiatan pada inovasi harus sesuai, (2) memastikan transparansi dalam setiap proses yang berjalan, (3) melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Sustainability: inovasi harus berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat tanpa merusak lingkungan dan tatanan budaya setempat. Kriteria *sustainability* adalah: (1) terobosan pembangunan telah dilaksanakan minimal 2 tahun,

(2) masyarakat terus terlibat dalam pemeliharaan terobosan pembangunan yang telah berjalan, (3) terdapat *Standard Operating Procedures* (SOP), (4) terdapat pembiayaan mandiri yang dikelola oleh masyarakat/kelompok masyarakat atau dari Pemerintah Daerah.

Impact: Inovasi harus dapat memberikan dampak dalam perbaikan kondisi suatu masalah di masyarakat. Kriteria *impact* adalah: (1) terdapat jumlah masalah yang bisa diselesaikan; (2) terdapat jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari sebuah inovasi; (3) lahirnya mekanisme dan proses pelaksanaan inovasi, regulasi, kelembagaan, serta pembiayaan baru yang dihasilkan karena adanya praktik baik inovasi.



BAGIAN II
KERJA INOVATIF
SISTEM INTEGRASI TERNAK ITIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



A. TANTANGAN DAN SOLUSI

Ketersediaan daging itik di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 produksi daging itik di Kalimantan Selatan mencapai 1.541. Sedangkan kebutuhan daging itik di tahun yang sama mencapai 1.886 ton. Maka untuk memenuhi konsumsi itik di Kalimantan Selatan memerlukan produksi tambahan sebesar 344 ton.

Kebutuhan konsumsi protein di Kalimantan Selatan juga terpantau terus meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan konsumsi kalori dan protein per kapita Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dalam rata-rata asupan protein harian mereka. Pada tahun 2021, rata-rata konsumsi protein di Kalsel berada di atas angka nasional. Konsumsi telur sebagai sumber protein juga terus meningkat di daerah tersebut. Sebagai gambaran, rata-rata konsumsi telur per kapita di Indonesia mencapai lebih dari 18 kg per tahun menurut BPS. Permintaan ini cenderung meningkat di wilayah-wilayah yang berkembang, seperti Kalimantan Selatan.

Kebutuhan konsumsi protein baik daging maupun telur tidak berbanding lurus dengan tingkat produktivitas hewan ternak seperti itik. Tren produktivitas itik terus menurun berdasarkan data BPS. Pada 2021, Kalsel memproduksi itik sebanyak 2.564 ton, namun pada 2022 jumlahnya anjlok menjadi 1.485 ton. Setahun kemudian atau pada 2023 produksi itik meningkat di angka 1.541 ton.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya menutup defisit kebutuhan daging dan telur dengan mendorong produksi itik jenis Alabio dan persilangan Mojosari dan Alabio (MA). Langkah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan inovasi Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (Siti Hawa Lari) yang dijadikan Program Prioritas Pembangunan.

Program Siti Hawa Lari dikembangkan dengan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir untuk



mendorong agribisnis berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan skala ekonomi dan pendapatan petani, percepatan swasembada daging, ketahanan pangan, kesejahteraan, serta pengendalian inflasi.

Di hulu, program yang dilakukan adalah peningkatan produktivitas itik pedaging dan petelur, mengembangkan kelembagaan dengan pembentukan klaster di setiap kabupaten. Sedangkan di hilir, Pemprov memberikan akses pembiayaan melalui perbankan, pelatihan marketing, dan hilirisasi produk.

B. KUNCI SUKSES

Kunci sukses keberhasilan program adalah kemampuan melihat potensi nilai ekonomi yang besar pada sektor peternakan itik, adanya kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD) dan peternak dalam mengembangkan usaha itik dari hulu sampai hilir, dan dukungan Gubernur yang menjadikan Siti Hawa Lari sebagai Program Prioritas Pembangunan yang didukung dengan alokasi pembiayaan dan regulasi. Program ini dilaksanakan, dievaluasi, dan dikendalikan secara bersama-sama oleh PD terkait dan dikoordinasikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan.



Gambar 1.
Kelompok peternak itik
(klaster) Jaya Bersama di
Desa Manang Baru,
Kecamatan Las,

Sungai Tengah



C. MENGAPA SITI HAWA LARI?

Innovation - Inovasi Program ini dikembangkan dengan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir untuk mengubah budidaya konvensional menjadi industri agribisnis itik yang meningkatkan skala ekonomi.

Feasibility – Inovasi layak untuk dilakukan replikasi karena memiliki kelembagaan, tahap pelaksanaan, pembiayaan dan dukungan regulasi. Kelembagaan dibuktikan dengan adanya sistem klasterisasi di setiap kabupaten dan terkoneksi dengan perbankan. Tahap pelaksanaan program memiliki mekanisme dan proses yang mudah untuk diaplikasikan. Alokasi pembiayaan inovasi didukung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Implementasi program prioritas ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0899/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Integrasi di Lahan Rawa dan Lahan Kering.

Participatory – Pengembangan Inovasi melibatkan *multistakeholder* meliputi unsur pemda, perbankan, akademisi, dan swasta. *Stakeholder* berkomitmen dalam berbagi ilmu pengetahuan (*knowledge sharing*), identifikasi permasalahan-permasalahan, serta melakukan monitoring dan evaluasi melalui media *whatsapp* grup peternak.

Replicability – Inovasi Siti Hawa Lari telah memenuhi 6 (enam) kriteria replikasi yang telah ditetapkan. Memiliki proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan didokumentasikan dengan baik. Inovasi dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, adanya dokumen pendukung dan panduan untuk memudahkan daerah lain mereplikasi.



Accountability – Mekanisme pengelolaan program telah terlembaga dengan pembentukan klasterisasi peternak yang melibatkan multi-*stakeholders*. Data hasil produksi peternakan itik pedaging dan petelur tercatat di Dinas Perdagangan Provinsi dan di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan di setiap kabupaten. Hasil penyuluhan dinas kepada peternak telah berhasil membuat laporan produksi dan laporan keuangan sederhana.

Sustainability – Program Siti Hawa Lari telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan alokasi pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten. Partisipasi masyarakat termasuk para pemuda dan kaum perempuan semakin bertambah jumlahnya, sementara peternak yang sudah lama terus berekspansi dengan menambah kandang dan jumlah itik.

Selain itu pada level pemerintah provinsi, telah terbentuk kerja sama antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Tentang Pengembangan Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengembangan program peternakan itik terus dilakukan melalui riset dengan Badan Riset Daerah (BRIDA) salah satunya pengembangan alternatif pakan yang berbahan baku limbah sawit.

Impact – Jumlah kelompok peternak itik pedaging dan petelur dan jumlah populasi terus meningkat setiap tahun. Pada 2022 terdapat 330 kelompok peternak itik dengan 1,18 juta ekor itik. Pada 2023 jumlah kelompok peternak meningkat menjadi 630 kelompok dengan 1,38 juta ekor itik. Pada 2024 jumlah kelompok peternak menjadi 699 kelompok dengan 1,66 juta ekor itik.

Dengan adanya program Siti Hawa Lari tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat menurun dari tahun 2022 sampai 2024. Program ini juga membuat tingkat kesejahteraan peternak membaik. Inovasi juga berhasil mengubah *mindset* cara budidaya itik dari konvensional menjadi model industri agribisnis dari hulu ke hilir.



BAGIAN III

PANDUAN REPLIKASI INOVASI SITI HAWA LARI

BAGAIMANA SITI HAWA LARI TERBENTUK

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



IDENTIFIKASI MASALAH

Ditemukan adanya defisit kebutuhan daging di Kalimantan Selatan, sementara potensi budidaya itik belum dimaksimalkan.



PERENCANAAN INOVASI

Pemprov Kalimantan Selatan membuat inovasi dengan memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering untuk budidaya itik melalui pendekatan agribisnis modern dari hulu ke hilir. Program ini kemudian ditetapkan sebagai program prioritas.



PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Melibatkan banyak pihak (pemerintah daerah, perbankan, akademisi, swasta) dengan klusterisasi peternak yang dikoneksikan dengan perbankan. Penetapan kelembagaan melalui SK Gubernur.



PELAKSANAAN PROGRAM

Program dimulai dengan pendataan peternak, pembentukan kluster, dan dukungan teknis seperti penyediaan bibit unggul, penyuluhan, dan bantuan prasarana.



PENDANAAN

Program didukung oleh APBD, KUR, dan kerja sama perbankan. *Offtaker* dan perusahaan swasta juga berperan dalam memastikan keberlanjutan pasokan dan pemasaran produk.



PENGEMBANGAN DAN REPLIKASI

Program terus dikembangkan dengan fokus pada peningkatan skala usaha, akses pasar, dan replikasi di daerah lain.

Gambar 2. Alur proses pembentukan Inovasi Siti Hawa Lari
Kalimantan Selatan

Inovasi Siti Hawa Lari dikembangkan dengan tahapan-tahapan yang terstruktur sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Tahapan tersebut adalah: Tahap perencanaan, perencanaan teknis, perencanaan kelembagaan, tahap operasional, serta tahap pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi.

A. TAHAPAN PERENCANAAN

Tahap perencanaan dalam inovasi Siti Hawa Lari dimulai dari tahap identifikasi masalah yaitu adanya defisit dalam memenuhi kebutuhan daging di Kalimantan Selatan. Pemprov kemudian melihat potensi budidaya itik di wilayah tersebut sangat tinggi namun belum dikelola secara optimal. Untuk itu Pemprov membuat inovasi yang mengintegrasikan bisnis proses agribisnis budidaya itik modern dengan model *close loop* dari hulu ke hilir. Di hulu, inovasi berupa teknik pembesaran itik dengan memanfaatkan lahan rawa dan lahan kering sebagai sumber pakan itik. Di hilir, pemerintah mendorong para UMKM untuk membuat produk turunan itik.

Inovasi yang sudah berlangsung sejak 2021 ini kemudian ditetapkan sebagai Program Prioritas Pembangunan oleh Gubernur Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0899/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Integrasi di Lahan Rawa dan Lahan Kering. Penetapan tersebut membuat kelembagaan inovasi semakin kuat dan solid.



Gambar 3. FGD penulisan buku Kerja Inovatif Mandiri Pangan antara Bappenas dan Pemprov Kalsel



Tahap awal sebelum pelaksanaan teknis dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan mendata para peternak itik di seluruh kabupaten, luasan kandang/potensi lahan yang dimiliki tiap peternak, dan jumlah itik yang dimiliki. Setelah data terkumpul Pemprov melakukan verifikasi dan membentuk klaster agribisnis itik serta menentukan fokus pengembangan di setiap klaster. Contohnya beberapa klaster di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara difokuskan untuk pengembangan peternak itik pedaging dan usaha pakan ternak sebab di sana sudah banyak usaha penetasan telur itik. Berbeda dengan klaster-klaster di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang fokus mengembangkan usaha penetasan telur itik atau indukan itik, sebab masih jarang peternak yang mengambil bentuk usaha tersebut.

Pada intinya perencanaan pengembangan klaster dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Melalui data yang telah dikumpulkan, maka fokus pengembangan klaster akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada tahapan perencanaan Siti Hawa Lari terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan inovasi. Mulai dari tersedianya bibit itik

berkualitas, identifikasi potensi lahan dan sumber daya alam lokal, potensi pasar yang tinggi di dalam dan luar daerah, sumber daya manusia berkualitas, dukungan pelaku usaha perkebunan dan peternakan, serta dukungan pemerintah pusat.

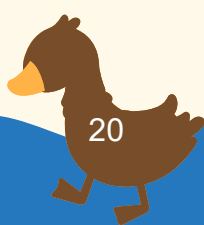


Gambar 4. Faktor utama pendukung keberhasilan Siti Hawa Lari

B. PERENCANAAN TEKNIS

Implementasi inovasi Siti Hawa Lari terdiri dari tiga fase utama. Yang pertama **inisiasi**, lalu kedua **pengembangan**, dan ketiga atau terakhir **improvisasi**.

Pada fase inisiasi, program ini dimulai dengan sosialisasi dan menarik komitmen masyarakat, khususnya para



peternak dan pelaku usaha. Dalam proses ini, masyarakat diajak berpartisipasi aktif dalam program melalui keterlibatan dalam aktivitas peternakan itik yang terintegrasi dengan lahan rawa dan kering.

Selanjutnya, pada fase pengembangan, dilakukan pengembangan klaster usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan pembinaan yang berkelanjutan melalui pendampingan teknis dan evaluasi yang terstruktur. Tujuannya adalah memperkuat skala usaha, kelembagaan, dan sistem produksi peternakan yang berkelanjutan.

Pada fase ini Pemprov membantu memfasilitasi sarana dan prasarana untuk beberapa klaster sesuai dengan kebutuhannya. Fasilitas dapat berupa penyuluhan, bantuan bibit, kandang, dan pakan. Bantuan tersebut dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD,

Perbankan dan CSR Produktif Perusahaan Swasta/Negara.

Fase ketiga, yaitu improvisasi, fase ini fokus pada peningkatan skala usaha melalui akses permodalan, kerjasama usaha, serta hilirisasi. Tujuan utama di sini adalah meningkatkan efisiensi serta akses pasar melalui dukungan kelembagaan yang kuat.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk mengatasi masalah optimalisasi budidaya itik yang terintegrasi dengan melibatkan banyak pihak. Program ini mengarahkan pola produksi, pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran menuju sistem yang lebih efisien, mandiri, dan modern melalui penggunaan teknologi informasi serta kelembagaan yang solid dan berkelanjutan.



IMPLEMENTASI PROGRAM SITI HAWA LARI



PEMECAHAN MASALAH



Gambar 5. Alur implementasi Inovasi Siti Hawa Lari

C.TAHAPAN PERENCANAAN KELEMBAGAAN

Terdapat enam level kelembagaan yang berperan dalam keberlangsungan Siti Hawa Lari. Berikut penjelasan masing-masing peran lembaga yang membuat inovasi ini dapat berjalan.

1. Pemerintah

Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perkebunan berperan dalam percepatan duplikasi dan multifikasi korporasi peternak itik, melakukan pengawasan terhadap akses bibit unggul dan bahan pakan, dan pembinaan teknis, monitoring, serta evaluasi program korporasi itik.

Dinas Perindustrian berperan dalam pembinaan UMKM agar menciptakan produk olahan dari hasil ternak itik. Beberapa produk yang berhasil dikembangkan yakni telur asin dan dendeng itik. Sementara bagian pemasaran produk UMKM dibina secara intensif oleh Dinas Perdagangan.

Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan berperan dalam menjaga ketersediaan bahan baku pembuatan pakan seperti jagung, dedak, dan ikan-ikan bahan baku pakan. Badan Riset Daerah (Brida) berperan dalam membedah kandungan gizi dari itik Alabio.

2. Lembaga Perbankan

Perbankan menjadi lembaga yang berperan penting terutama untuk meningkatkan skala bisnis peternak itik baik pedaging maupun peternak. Pada inovasi ini, terdapat target penyaluran kredit usaha rakyat untuk peternak itik pedaging dan petelur, di antaranya:

- Peternak petelur: Berperan untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp100 juta per peternak untuk membeli 1.000 ekor itik petelur.
- Peternak pedaging: Berperan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) Rp100 juta per peternak untuk membeli 3.000 ekor itik pedaging.





Gambar 6. Peternak itik petelur
Klaster Jaya Bersama

3. *Offtaker*

(asosiasi/pengusaha/perorangan)

Peran *offtaker* adalah sebagai penjamin peternak yang mengajukan KUR untuk usahanya. Selain itu *offtaker* juga berperan dalam menjamin ketersediaan pakan, bibit bebek/*day old duck* (DOD), obat, vitamin bagi peternak. Peran selanjutnya dari *offtaker* adalah melakukan pendampingan teknis, non-teknis dan manajerial, serta penyerapan *livebird* dari peternak.

4. *Breeding farm/feedmill*/perusahaan obat hewan

Beberapa perusahaan-perusahaan terlibat dalam operasional mitra peternak. Pertama, perusahaan *breeding* yang menjamin ketersediaan DOD yang terstandar, *feedmill* yang memasok pakan peternak, dan perusahaan obat hewan yang memasok vitamin dan obat-obatan hewan ternak.

5. Klaster peternak

Petelur:

Satu klaster peternak terdiri dari 3-10 peternak. Setiap peternak memelihara sekitar 1.000 peternak dengan target produksi 5.000 butir per minggu. Tiap klaster peternak bebek petelur memiliki target dapat memelihara daya hidup hewan sebesar 90%, FCR 3,6, produktivitas telur 72% dan lama produksi 46 WOP (24-70 minggu).

Pedaging:

Satu klaster peternak terdiri dari 3-10 peternak. Setiap peternak memelihara sekitar 3.000 peternak dengan target produksi 5.000 ekor per minggu. Tiap klaster peternak bebek petelur memiliki target dapat memelihara daya hidup hewan sebesar 97%, kemudian rasio konversi pakan/feed conversion ratio (FCR) 1,8 - 2, dan umur panen 28-42 hari.



D. TAHAPAN OPERASIONAL

Pada tahap operasional, ternak itik Siti Hawa Lari dilakukan secara semi insentif. Pemeliharaan dilakukan dengan cara mengelola kebutuhan hidup dan kesehatan itik di dalam kandang dan dalam umbaran secara terbatas.

Teknik pembesaran itik dibagi menjadi beberapa fase. Pada fase awal atau *starter* umur 0-2 bulan, ternak itik dikandangan dengan pemberian pakan lokal dan atau pakan yang telah terdaftar dan berlabel. Fase *grower* umur 2-5 bulan ternak itik di lepas dilahan rawa dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber pakan lokal yang ada disekitar rawa tersebut dan pada fase *breeder/layer* umur di atas 5 bulan ternak itik Kembali dimasukkan ke dalam kandang agar dapat menghasilkan telur secara maksimal dengan memberikan pakan dengan protein tinggi.

Budidaya itik petelur dan daging adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak itik sampai dengan menghasilkan telur konsumsi dan daging itik. Terdapat beberapa komponen dalam manajemen pemeliharaan itik yang masing-masing akan dijelaskan lebih rinci.

Bibit Itik:

Pemilihan bibit itik harus mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dipelihara. Ternak Itik Alabio dikembangkan di daerah Kalimantan Selatan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- Warna bulu coklat dengan bintik-bintik putih diseluruh badan dengan garis putih di sekitar mata;
- Warna bulu pada pejantan cenderung gelap;
- Pada sayap terdapat beberapa helai bulu suri berwarna hijau kebiruan mengkilap;
- Warna paruh dan kaki kuning terang;
- Umur 6 bulan bobotnya 1,60 kg dan jantan 1,75 kg, produksi telurnya rata-rata 220-250 butir/ekor/tahun.

Pakan:

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada produksi telur itik. Itik petelur membutuhkan pakan sebanyak 160 gr/ekor/hr dan harus memenuhi kandungan nutrisi. bahan pakan bisa tunggal atau campuran, baik



yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan pada itik untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

Kandang:

Persyaratan kandang yang harus dipenuhi adalah yang mudah dibersihkan, sirkulasi udara lancar dan cukup mendapatkan sinar matahari.



Gambar 7. Pengelolaan kandang itik

Penanganan Kesehatan:

Usaha pengendalian merupakan usaha pencegahan sekaligus pembasmian yang bertujuan untuk

mengurangi serangan penyakit sekecil mungkin sehingga kerugian yang bersifat ekonom dapat ditekan seminimal mungkin, sedangkan tujuan pembasmian adalah menghilangkan penyakit tertentu pada ternak secara tuntas.

Pengelolaan Pascapanen:

Pengolahan pasca panen daging dan telur itik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dalam upaya mendorong pendapatan dan gizi masyarakat, pasca panen yang sudah ada pada program SITI Hawa Lari berupa telur asin, telur asap, dendeng itik, kerupuk itik, daging itik beku.

Pemasaran:

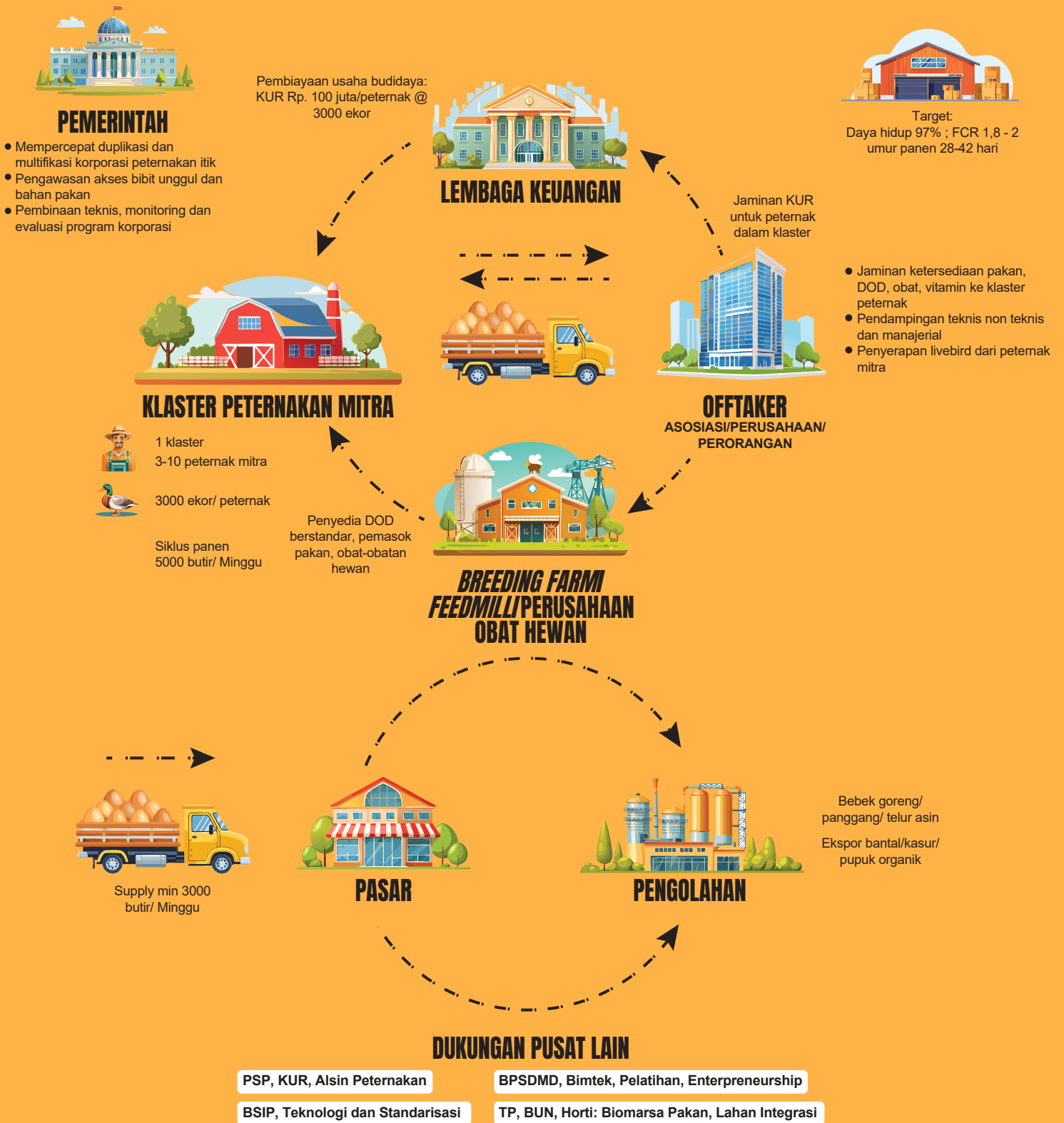
Proses pemasaran itik spesial pedaging melalui pemotongan di rumah potong hewan unggas (RPHU) baik dinas maupun swasta, kemudian didistribusikan dalam bentuk karkas ke Hotel Restoran dan Kafe (HOREKA), serta ke unit-unit pengolahan daging. Sedangkan untuk pemasaran telur itik langsung didistribusikan ke pasar dan ke unit-unit pengolahan telur.

Pengelolaan Pakan

Teknik pengelolaan pakan lokal merupakan salah satu komponen penting dalam industri perunggasan termasuk pada usaha budidaya itik petelur.



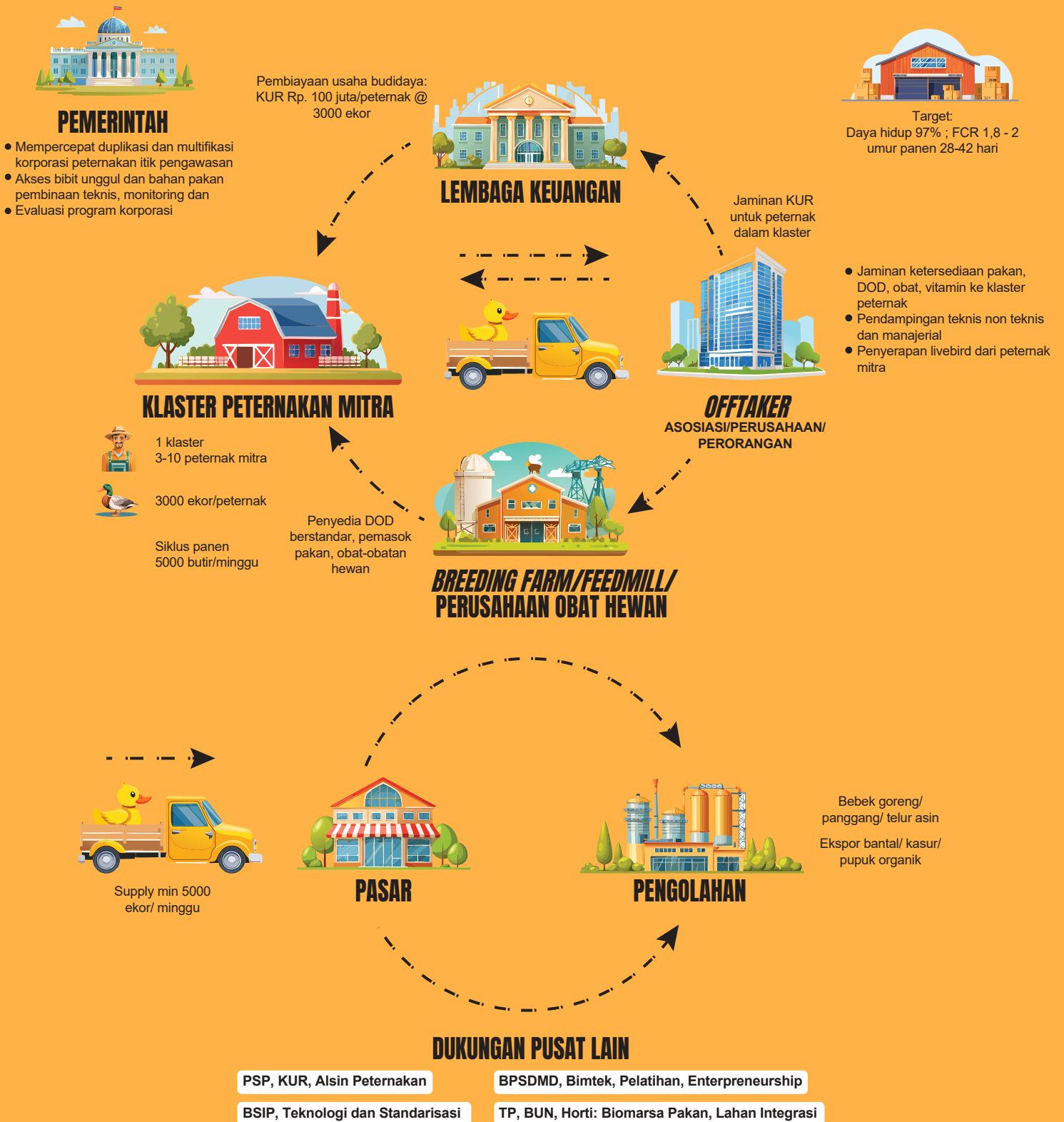
PENGEMBANGAN SITI HAWA LARI MODEL *CLOSED LOOP* (PETELUR)



Gambar 8. Pengembangan itik petelur model *closed loop*



PENGEMBANGAN SITI HAWA LARI MODEL *CLOSED LOOP* (PEDAGING)



Gambar 9. Pengembangan itik pedaging model *closed loop*



Pemberian pakan itik petelur pada prinsipnya tidak boleh sembarangan tetapi harus tepat dan efisien dengan mengatur pemberian pakan sesuai kebutuhan itik di setiap fasenya. Sesuai dengan agroekosistem lahan di Kalimantan Selatan yang sebagian besar terdiri atas lahan rawa dan didukung dengan ketersediaan bahan pakan lokal, maka pengembangan ternak itik dapat berjalan dengan baik.

Bahan pakan diutamakan bersumber dari bahan pakan lokal, yang dapat diberikan dalam bentuk halus (*mash*), butiran (*crumble*) atau pelet, dengan kandungan sesuai standar SNI/PTM. SNI Pakan Itik disusun untuk meningkatkan jaminan mutu dan keamanan pakan karena sangat mempengaruhi produktivitas itik petelur secara keseluruhan. Berikut penjelasan tiga standar SNI Pakan Itik:

1. SNI 3908 : 2017, Pakan meri petelur (*laying duck starter*) merupakan revisi dari SNI 01-3908-2006;

2. SNI 3909:2017, Pakan itik petelur dara (*laying duck grower*) merupakan revisi dari SNI 01-3909-2006; dan
3. SNI 3910:2017, Pakan itik petelur masa produksi (*duck layer*) merupakan revisi dari SNI 01-3910-2006.

Manajemen pemberian pakan itik yang baik melibatkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten untuk memastikan itik mendapatkan nutrisi yang cukup sesuai dengan kebutuhannya pada setiap tahap pertumbuhan. Berikut adalah panduan manajemen pemberian pakan itik yang baik:

1. Pemilihan Jenis Pakan

- Pakan komersial: Pilih pakan komersial yang diformulasikan khusus untuk itik, yang sudah mengandung nutrisi lengkap sesuai kebutuhan itik pada berbagai fase pertumbuhan.



- Pakan alami dan tambahan: Kombinasikan pakan komersial dengan bahan pakan alami seperti dedak padi, jagung giling, bekatul, dan sisa sayuran. Selain itu pakan tambahan alami di lahan rawa seperti keong mas, ikan runcah, dan sedikit eceng gondok yang dicacah bisa dipadukan untuk ternak itik dara (*grower*). Ini dapat mengurangi biaya pakan dan memberikan variasi dalam pakan itik.

2. Komposisi Nutrisi

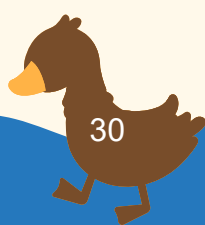
- Pakan meri petelur/*starter* (0-6 minggu): pakan dengan kandungan protein kasar sekitar 20-22% untuk mendukung pertumbuhan yang cepat (min. 18% sesuai SNI 3908: 2017).
- Pakan itik petelur dara/*grower* (7-18 minggu): pakan dengan kandungan protein sekitar 16-18% (min. 15% sesuai SNI 3909 : 2017).
- Pakan itik petelur masa produksi//*layer* (> 18 minggu): pakan dengan kandungan protein sekitar 17-18% (min. 17%) dan kalsium tinggi (2,90-4,25%) untuk mendukung produksi telur (sesuai SNI 3910:2017).

3. Metode Pemberian Pakan

- Ad libitum: Pakan disediakan sepanjang waktu, terutama pada fase *starter* untuk memastikan itik mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan optimal.
- Terukur: pada fase *grower* dan *layer*, pakan diberikan dalam jumlah yang terukur dua hingga tiga kali sehari.
- Sistem Prasmanan: pakan diberikan dengan cara mencampurkan berbagai jenis pakan baik berbentuk *mash*, *crumble*, ataupun *pellet* dalam sekali pemberian pakan, sehingga ternak itik dapat memilih bentuk/jenis pakan yang disukainya dengan kandungan nutrisi yang seimbang.

E. MONITORING & EVALUASI

Peran Pemerintah dalam pengembangan Siti Hawa Lari sangat dibutuhkan guna mempercepat replikasi peternakan itik dengan pengembangan agribisnis dari hulu ke hilir melalui pembentukan klaster-klaster peternak. Agar proses tersebut dapat berjalan



optimal perlu dilakukan pengawasan atau monitor dan evaluasi pada pelaksanaan Siti Hawa Lari. Metode pembuatan *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian program Siti Hawa Lari yang dilakukan secara berkala adalah sebagai berikut:

- Membuat SK Tim *Recording* Pelaporan Siti Hawa Lari.
- Membuat *link* Google Form untuk melaporkan setiap perkembangan yang ada di klaster-klaster itik.
- Kabupaten/Kota harus mengisi laporan setiap bulannya sebelum tanggal 5 bulan berjalan.
- Petugas *Recording* Provinsi melakukan perekapan data setiap bulan dan dilaporkan ke atasan sebagai pertanggungjawaban.
- Klaster peternak wajib membuat pencatatan penjualan sederhana.

F. DUKUNGAN REGULASI

Pada 26 Oktober 2023 Inovasi Siti Hawa Lari ditetapkan sebagai Program Prioritas melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0899/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja

Pengembangan Sistem Integrasi di Lahan Rawa dan Lahan Kering. Pemprov Kalsel menilai perlu upaya percepatan pengembangan budidaya itik sesuai dengan mandat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal.

Unsur Pokja Siti Hawa Lari terdiri dari para PD dinas terkait Pemprov Kalsel, dinas yang membidangi perkebunan dan peternakan di kabupaten/kota seluruh Kalimantan Selatan, Bank Indonesia, Bank Kalsel, UPT Kementerian Pertanian, perguruan tinggi (ULM dan UNISKA), Sekolah Peternakan (SMK-PP Negeri Pelaihari dan SMK-PP Negeri Banjarbaru) GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), dan Praktisi. Tim tersebut langsung berada di bawah pengarahannya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bertindak sebagai penanggung jawab dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda sebagai ketua Pokja. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjuk



sebagai Sekretaris Pokja, diberi wewenang untuk menjadi koordinator pelaksanaan inovasi tersebut di lapangan.

G. ALOKASI & PEMBIAYAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0899/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Integrasi di Lahan Rawa dan Lahan Kering, disebutkan segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Program Prioritas

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan yang secara spesifik difokuskan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan. Alokasi anggaran dalam pelaksanaan Program Siti Hawa Lari dijelaskan pada tabel berikut:

No	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Pengadaan Ternak Itik, Kandang, Pakan dan pendukung lainnya	14.593.766.600	10.992.156,467	19.413.205.960	8.572.481.000	APBD I, APBD II

Tabel 1. Alokasi anggaran Inovasi Siti Hawa Lari pada tahun 2021-2024



BAGIAN IV
KERJA INOVATIF
BUDIDAYA IKAN PATIN
KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU





A. TANTANGAN DAN SOLUSI

Kabupaten Kampar sudah lama dikenal sebagai kawasan sentra perikanan budidaya ikan patin di Indonesia. Sejak 2010, Kampar ditetapkan sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010. Kampar juga ditetapkan sebagai kawasan industrialisasi perikanan khususnya komoditas ikan patin.

Berdasarkan data statistik tahun 2023 produksi hasil perikanan di Provinsi Riau hampir 70% berasal dari Kabupaten Kampar dan hampir 40% berasal dari komoditas patin. Hal tersebut membuat Kampar dikenal sebagai lumbung perikanan nasional. Namun dalam upaya pengembangannya pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang





efisien dan berkualitas, tetapi dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting, karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70% (DJPB, 2018). Hal ini mengandung arti bahwa harga pakan sangat berperan dalam menentukan tinggi atau rendahnya biaya produksi yang akan menentukan daya saing ikan baik di pasar lokal maupun luar daerah .

Kabupaten Kampar sebagai salah satu sentra ikan patin di Provinsi Riau sangat membutuhkan pakan ikan untuk menjalankan produksi perikanan budidaya. Ketersediaan pakan ikan dengan harga yang tinggi menjadi salah satu permasalahan serius yang kerap dihadapi oleh kebanyakan pembudidaya ikan di Kampar.

Menyadari permasalahan di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar





hadir di tengah-tengah masyarakat pembudidaya ikan untuk mendukung usaha pakan ikan mandiri dengan cara memberikan bantuan mesin pakan walaupun masih skala kecil. Melihat tingginya kebutuhan dan semakin tingginya harga pakan pabrikan, sangat diperlukan keberadaan pabrik usaha pakan mandiri skala pabrik untuk bisa meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Salah satu tantangan utama yakni keterbatasan akses terhadap cara budidaya ikan yang lebih modern

dan ramah lingkungan. Banyak peternak ikan masih menggunakan metode tradisional yang tidak efisien dan rentan terhadap penyakit, sehingga hasil produksi ikan patin kurang optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan, pasokan listrik, dan fasilitas pengolahan hasil perikanan menjadi hambatan besar bagi masyarakat setempat. Kondisi ini membuat hasil panen sulit dijual ke pasar yang lebih luas, mengurangi potensi pendapatan petani ikan.





Kurangnya akses terhadap pasar juga diperparah oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran digital, yang merupakan hal penting dalam era globalisasi saat ini.

Petani ikan patin di Desa Masjid Koto sering kali terpaksa menjual hasil panen mereka kepada tengkulak dengan harga rendah karena kurangnya alternatif pasar yang lebih menguntungkan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Kampar membuat terobosan dengan pembangunan Kampung Patin di Desa Masjid Koto, Kecamatan XIII

Koto Kampar. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan sebab sejak 2007 Desa Masjid Koto sudah memiliki slogan pembangunan “Tiada Rumah Tanpa Kolam” yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2007.

Upaya tersebut menghasilkan *multiplier effect* yang sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. *Multiplier effect* yang tumbuh dan berkembang pada saat ini adalah usaha pembenihan ikan, usaha pendederan ikan, usaha pembuatan pakan ikan, usaha paska panen, buruh

tangkap di kolam, buruh pembuat pakan ikan, usaha pembesaran ikan beserta seluruh rantai seperti pedagang pengecer/bakulan dan masih banyak usaha lain yang sangat membantu kehidupan masyarakat.

Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin untuk Desa Koto Masjid melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :KEP. 16/MEN/2022 tanggal 13 Maret 2022. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan sektor perikanan Kabupaten Kampar hingga menghasilkan produk-produk hilirisasi sampai sekarang.

B. KUNCI SUKSES

Faktor utama keberhasilan inovasi adalah munculnya keinginan dari kelompok masyarakat untuk memiliki pekerjaan pengganti setelah adanya pembangunan Bendungan Koto Panjang. Masyarakat yang terdampak direlokasi ke wilayah yang memiliki kualitas air bagus untuk budidaya perikanan. Aspirasi masyarakat

direspons Dinas Perikanan dengan membuat program Satu Rumah Satu Kolam dengan komoditas ikan patin.

Program dikembangkan dengan model agribisnis hulu ke hilir yang melibatkan multi stakeholders. Kolaborasi yang kuat antara Pemkab, Pemprov, dan masyarakat mendorong pengembangan kelompok pembudidaya, pembenihan, pembuatan pakan mandiri, dan pengembangan UMKM.

C. MENGAPA KAMPUNG PATIN?

Praktik baik dan kerja inovatif masyarakat Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin di Desa Koto Masjid telah memenuhi kriteria dan layak untuk direplikasi. Kriteria tersebut yaitu:

Innovation– praktik baik budidaya ikan patin dikembangkan dengan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir guna meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan masyarakat. Perikanan budidaya ikan patin telah menjadi agribisnis yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Komitmen

pemerintah daerah dalam budidaya ikan patin menargetkan Kabupaten Kampar menjadi lumbung perikanan nasional.

Feasibility – praktik baik budidaya ikan patin layak untuk dilakukan replikasi karena memiliki kelembagaan, tahap pelaksanaan, pembiayaan dan dukungan regulasi. Kelembagaan dibuktikan dengan adanya 15 kelompok budidaya ikan dengan rata-rata satu kelompok 10 orang. Tahap pelaksanaan program memiliki mekanisme dan proses yang mudah untuk diaplikasikan.

Alokasi pembiayaan inovasi didukung oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan pemerintah pusat dengan menetapkan pemerintah daerah Kampar sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/Men/2010 tanggal 14 Mei 2010. Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin untuk Desa

Koto Masjid melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: KEP. 16/MEN/2022 tanggal 13 maret 2022.

Participatory – keterlibatan *multistakeholder* di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP), Pemda Kampar, Perbankan, Koperasi Jaring Emas Sejahtera, CSR, dan Universitas Riau (UNRI) telah berhasil mengembangkan usaha budidaya ikan patin yang berkelanjutan. Orkestrasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Pemda Kampar telah berhasil mengembangkan inovasi pembenihan, pembesaran, pembuatan pakan mandiri, pengolahan ikan asap, ikan *fillet*, abon ikan, dan olahan ikan *crispy*.



Gambar 10. Pengolahan ikan asap produk turunan ikan patin



Gambar 11. Produk turunan ikan patin

Keterbukaan masyarakat dan pemerintah menjadikan Desa Koto Masjid sebagai pusat pembelajaran mahasiswa dari berbagai daerah dan penda dari luar Provinsi Riau. Selain itu adanya keterbukaan masyarakat untuk segera melaporkan ke pemerintah jika ditemukan masalah dalam budidaya. Pada kesanaan monitoring dan evaluasi berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara bersama.



Gambar 12. Warga Desa Koto Masjid sedang mengolah produk turunan ikan patin

Replicability – praktik baik budidaya ikan patin telah memenuhi kriteria replikasi yang telah ditetapkan. Pertama memiliki proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan didokumentasikan dengan baik. Kedua, inovasi dapat menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat, kemudian ketiga pemerintah daerah telah mengembangkan inovasi baru, serta keempat pemerintah daerah menyediakan panduan untuk memudahkan daerah lain mereplikasi inovasi.

Accountability – mekanisme pengelolaan praktik baik budidaya ikan patin telah terlembaga dengan pembentukan kelompok-kelompok dan klusterisasi pembudidaya. Proses bisnis ikan patin telah melibatkan *multi-stakeholders*. Data hasil produksi ikan patin tercatat di Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Evaluasi dan pemantauan perkembangan yang terintegrasi antar PD menjadikan program ini berjalan dengan baik.

Sustainability – Praktik baik budidaya ikan patin di Desa Koto Masjid terus menerus didampingi dan dilatih oleh Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta dukungan *stakeholders* untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan meningkatkan kuantitas produk. Partisipasi masyarakat termasuk para milenial dan kaum perempuan semakin bertambah jumlahnya, sementara pembudidaya terus berekspansi dengan menambah kolam ikan dan peningkatan produktivitas pasca panen.

Impact – Luasan lahan budidaya ikan patin saat ini mencapai 140 Ha dan memiliki potensi pengembangan lahan baru mencapai 200 Ha. Saat ini terdapat 200 rumah tangga pembudidaya ikan patin yang terbagi dalam 15 kelompok.

Hasil produksi ikan patin mencapai 300-350 ton/bulan dan mesin pakan mandiri mencapai 35 unit alat pengolah pakan.

Selain itu masyarakat juga mengembangkan produk olahan ikan dengan mesin pengolahan mencapai 15 unit alat pengolahan ikan. Sedangkan produksi ikan asap selai mencapai 60.000 Kg/bulan dan produksi nugget mencapai 400 Kg/bulan. Program budidaya ikan patin dan pengolahannya yang terintegrasi membuat tingkat kesejahteraan pembudidaya membaik. Berbagai Inovasi dan praktik baik juga berhasil mengubah mindset cara budidaya dengan pendekatan industri agribisnis dari hulu ke hilir.

BAGIAN V

PANDUAN REPLIKASI PRAKTIK BAIK

BUDIDAYA IKAN PATIN

BAGAIMANA PROGRAM KAMPUNG PERIKANAN BUDIDAYA IKAN PATIN KAMPAR BERJALAN

1



IDENTIFIKASI MASALAH

Program Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin di Desa Koto Mesjid, Kec. XIII Koto Kampar, dimulai ketika Pemkab Kampar bersama masyarakat menggali potensi daerah untuk mencari mata pencaharian baru. Mereka akhirnya menemukan potensi sumber air yang bagus untuk budidaya ikan.

2



INISIATIF MASYARAKAT

Masyarakat Desa Koto Mesjid berinisiatif memanfaatkan sumber air yang tersedia dengan membangun kolam dan mulai budidaya ikan patin secara mandiri.

3



RESPON PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan solusi dengan mendukung usaha pakan mandiri, menyediakan mesin pakan, serta membangun infrastruktur yang mendukung budidaya. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.

4



KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER

Program ini melibatkan pemerintah pusat, Provinsi, Dinas Perikanan, UMKM, serta pendanaan dari APBD dan CSR untuk mendukung pembudidayaan dalam penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran produk.

5



PENGEMBANGAN HILIRISASI

Selain budidaya, produk turunan seperti ikan *fillet*, abon, dan ikan salai dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat

6



KEBERLANJUTAN

Program ini berjalan berkelanjutan dengan dukungan regulasi, pelatihan rutin, evaluasi oleh dinas terkait, serta peningkatan produktivitas melalui inovasi ekspansi



A. TAHAPAN PERENCANAAN

Program Kampung Perikanan Budidaya Ikan Patin di Desa Koto Mesjid, Kec. XIII Koto Kampar, dimulai ketika Pemerintah Kabupaten Kampar bersama masyarakat sekitar yang harus direlokasi karena pembangunan Bendungan Koto Panjang, menggali potensi daerah untuk mencari mata pencaharian baru. Mereka akhirnya menemukan potensi sumber air yang bagus untuk budidaya ikan. Setelah studi kelayakan dan analisis

potensi lingkungan, ditemukan komoditas yang cocok adalah ikan patin.

Masyarakat berinisiatif untuk membangun kolam di dekat rumah mereka. Selanjutnya Dinas Perikanan merespons inisiatif tersebut dengan memberikan penyuluhan teknis cara budidaya ikan patin yang baik. Di antaranya pemberian kapur untuk kolam, pembuatan drainase kolam, sampai penebaran benih. Setelah itu, dibentuk tim kerja yang terdiri dari perangkat desa, kelompok pembudidaya ikan, dan tim teknis





untuk memastikan kelancaran program. Sosialisasi juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tahap selanjutnya adalah penyusunan rencana anggaran dan sumber pendanaan, baik dari dana desa, APBD, maupun mitra swasta.

Setelah dana tersedia, pembangunan infrastruktur seperti kolam ikan, sistem pengelolaan air, dan fasilitas pendukung lainnya dilakukan, diikuti dengan pelatihan bagi masyarakat dalam teknik

budidaya, manajemen usaha, serta pengelolaan lingkungan. Untuk memastikan kelancaran, *monitoring* dan evaluasi dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi kendala dan mengukur peningkatan produksi. Program ini diharapkan berjalan secara berkelanjutan dengan pengembangan produk turunan ikan patin, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



B. PERENCANAAN TEKNIS

Program Kampung Budidaya Ikan Patin di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dimulai dengan tahap pendataan para pembudidaya ikan patin yang telah memanfaatkan kolam di depan rumah mereka. Tim teknis dari pemerintah daerah bekerja sama dengan dinas terkait dan kepala desa untuk melakukan survei langsung ke setiap rumah yang memiliki kolam budidaya. Pendataan ini penting untuk mengetahui jumlah pembudidaya

aktif, luas kolam, serta kapasitas produksi yang sudah berjalan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan lebih lanjut. Hasil pendataan ini akan menjadi peta awal potensi budidaya ikan patin di wilayah tersebut.

Setelah pendataan selesai, masyarakat yang terlibat dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan kolam yang baik dan berkelanjutan. Sosialisasi ini meliputi pembahasan tentang teknik perawatan kolam, manajemen air, pemilihan pakan





yang tepat, serta pencegahan penyakit pada ikan patin. Pada tahap ini, masyarakat juga diberikan wawasan tentang keuntungan budidaya ikan patin secara kolektif dan peran penting yang dapat mereka mainkan dalam meningkatkan perekonomian desa. Pemerintah juga memfasilitasi pelatihan teknis yang melibatkan penyuluh perikanan dan pakar budidaya agar pembudidaya dapat mengoptimalkan hasil kolam mereka.

Selanjutnya, masuk ke tahap pembenihan ikan patin. Pembenihan dilakukan dengan memilih bibit ikan yang unggul untuk memastikan kualitas hasil produksi. Pada tahap ini, pembudidaya diajari cara menyeleksi bibit, teknik pemijahan, dan cara menjaga kualitas air selama masa pembenihan agar ikan dapat tumbuh sehat dan optimal. Bibit-bibit yang dihasilkan dari kolam-kolam ini nantinya akan menjadi dasar dari siklus budidaya yang berkelanjutan dan diharapkan meningkatkan produktivitas ikan patin di desa tersebut.



Ketika ikan patin sudah mencapai usia panen, masyarakat diajari cara panen yang baik dan efisien. Panen dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas pasar dan kualitas ikan. Setelah panen, dilakukan kegiatan pasca panen yang mencakup penanganan ikan secara higienis agar kualitasnya tetap terjaga. Pada tahap ini, teknologi sederhana dan teknik modern diperkenalkan untuk meningkatkan daya saing produk ikan patin di pasar lokal maupun luar daerah.

Tahap akhir dari program ini adalah pengolahan produk turunan dari ikan patin. Masyarakat diajari cara mengolah ikan patin menjadi berbagai produk seperti *fillet*, abon, kerupuk, atau produk-produk olahan lainnya yang memiliki nilai tambah. Hal ini dilakukan agar hasil budidaya tidak hanya dijual dalam bentuk ikan segar, tetapi juga dalam bentuk produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Dengan pengolahan ini, diharapkan Kampung Budidaya Ikan Patin di

Kabupaten Kampar tidak hanya menjadi pusat produksi ikan, tetapi juga pusat industri olahan ikan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

C. PERENCANAAN KELEMBAGAAN

Terdapat 3 (tiga) aktor utama pada keberhasilan praktik baik Budidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar dengan peran, teknologi dan spesialisasinya sehingga terjadi ekosistem yang menunjang budidaya dari hulu hingga ke hilirnya. Berikut penjelasan masing-masing peran lembaga yang membuat praktik baik ini dapat berjalan.

1. Pemerintah

Terdapat 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang berperan dalam keberlangsungan Budidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid, yaitu:

UPT Balai Benih Ikan Kampar: Unit ini berperan dalam menghasilkan indukan dan bibit berkualitas serta

dapat memberikan sertifikasi pembenihan ikan. Untuk Desa Koto Masjid, hingga saat ini terdapat 5 (lima) Unit Pembenihan Rakyat (UPR) beranggotakan 15 orang yang berada di bawah naungan dan pengawasan UPT Balai Benih Ikan Kampar.

UPT mempunyai peran dalam memberi bantuan induk unggul kepada UPR Desa dan membantu sarana prasarana seperti aerator untuk 60 kelompok pembudidaya. Kegiatan rutin per tahun alokasi melalui APBD Kabupaten Kampar. Selain itu, Dinas melalui UPT juga mengoordinasi bantuan berupa calon induk dari Balai Benih Perikanan Air Tawar Jambi kepada UPR Desa sehingga dapat meningkatkan jumlah benih yang tersedia bagi Kelompok Pembudidaya Desa Koto Masjid.

UPT Produksi Hasil Perikanan:

Unit ini mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, bimbingan dan penyebarluasan teknologi pengolahan hasil perikanan, teknologi alat dan mesin pengolah hasil perikanan, serta rancang bangun dan tata letak

sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Saat ini sudah terdapat 36 (tiga puluh enam) dapur produksi hasil perikanan serta terdapat 13 (tiga belas) kelompok produksi ikan salai. UPT juga memberikan sarana dan prasarana untuk kebutuhan produksi ikan salai seperti tungku pengasapan hingga mesin pengemasan hasil produksi ikan salai.

UPT Pakan: Unit ini mempunyai tanggung jawab yang pertama untuk memastikan terjaminnya mutu dan ketersediaan pakan ikan di wilayah Kampar. Kedua memantau dan membina pelaku usaha pakan mandiri di Desa Koto Masjid dan ketiga memberikan bantuan pakan untuk pembudidaya.

UPT Laboratorium Penyakit Ikan dan Lingkungan:

Terdapat tenaga analis yang dikerahkan khusus untuk Desa Koto Masjid yang memberikan laporan pada setiap bulannya. Tenaga analis ini juga bertugas untuk memantau kualitas air kolam masyarakat pembudidaya sehingga jika ada kendala atau

laporan dari warga terhadap suatu kondisi di lapangan, maka Dinas serta UPT terkait cepat dan tanggap menanganinya. Laboratorium Kampar memegang peran yang penting dalam keberlangsungan Budidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid dan merupakan salah satu yang terbaik di Riau.

2. Masyarakat Pembudidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid

Kelompok pembudidaya ikan patin telah terbentuk sebanyak 15 (lima belas) kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan budidaya mulai dari pembenihan sampai pembesaran ikan patin.

Usaha budidaya ikan patin ini telah berkembang secara masif karena telah berlangsung sejak lama dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat Desa Koto Masjid.

Selain itu kelembagaan di bidang pengolahan hasil perikanan juga telah berkembang dimana total kelompok Unit Pengolahan Ikan berjumlah 15 Kelompok dan telah memproduksi hasil olahan dengan skala besar.

Keberlangsungan Budidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid dapat terjadi karena pembagian tugas, peran dan kelembagaan yang baik di dalam masyarakat desa. Hal ini menjadikan masing-masing unit dapat bergerak, melakukan pengembangan serta

URAIAN	KETERANGAN
Jumlah Kelompok Budidaya	15
Rata-rata jumlah anggota per kelompok	10 Orang
Jumlah kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	15
Jumlah anggota per kelompok	5
Jumlah Koperasi	Koperasi Perikanan : 1 Unit Koperasi Desa : 1 Unit Bumdes : 1 Unit
Ketersediaan sarana input produksi dan pasca produksi di desa	1. Penyedia Benih : 5 Unit 2. Penyedia Pakan Mandiri : 32 Unit 3. Sentra Pengolahan Perikana : 1 Unit 4. Pasar Ikan : 1 Unit 5. Cold Storage: : 1 Unit

Tabel 2. Data kelompok budidaya ikan patin Desa Koto Masjid

mengaplikasikan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami dari hulu hingga ke hilir budidaya Ikan Patin.

Pembenihan

Penyediaan benih sangat penting dalam melancarkan usaha pembesaran ikan. Saat ini telah ada 5 (lima) Unit Pembenihan Rakyat (UPR) di Desa Koto Masjid yang dikelola oleh masyarakat. Sarana prasarana untuk UPR tergolong baik dengan bangunan yang telah memenuhi persyaratan. Sumber indukan yang didapatkan oleh UPR berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan Balai Besar Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Provinsi Jambi. Kemampuan membenihkan ikan

patin saat ini telah sampai pada tahap benih, dengan jumlah produksi benih di setiap UPR yang ditampilkan pada Tabel berikut ini:

Pembesaran

Jumlah pembudidaya pada usaha pembesaran patin sebanyak 200 orang dengan luas areal budidaya yang mencapai 140 ha dengan rata-rata luas per unit kolam budidaya mencapai 600 m². Jumlah rata-rata unit kepemilikan per pembudidaya sebanyak 4 unit. Adapun jenis kolam yang digunakan adalah kolam tanah. Terkait teknologi yang saat ini digunakan adalah teknologi budidaya semi intensif dengan padat tebar 50 ekor/m². Dengan ukuran tebar 1-4 cm maka ukuran panen ikan berisi 4-6 ekor/kg. Pada saat ini kondisi

NAMA UPR	PRODUKSI (EKOR/BULAN)	UKURAN BENIH (inch)	LOKASI PENJUALAN
Graha Fratama Fish	750.000	1	Koto Masjid
Cucu Datuk Fish	250.000	1	Koto Masjid
One Fish Farm	600.000	1	Koto Masjid
Angkasa Fish	400.000	1	Koto Masjid
Puktopan Fish	100.000	1	Koto Masjid
Teddy Fish	400.000	1	Koto Masjid
Total	2,500,000		

sumber: Dinas Perikanan 2023

Tabel 3. Data produksi budidaya ikan patin Desa Koto Masjid



URAIAN	KETERANGAN
Luas Lahan Budidaya Potensial	Kolam : 200 Ha
Luas Lahan Eksiting Budidaya	Kolam : 140 Ha
Jumlah Rumah Tangga Perikanan	200 orang
Jumlah Kelompok Budidaya	15
Rata-rata Jumlah Anggota per kelompok	10 Orang
Jumlah Produksi	300 - 500 ton/bulan
Pakan Mandiri	35 Unit

sumber: Data Primer 2023

Tabel 4. Data Rangkuman Produksi Kelompok Budidaya Ikan Patin Desa Koto Masjid

existing kebutuhan benih ikan patin sebanyak 2.500.000 – 3.000.000 ekor/bulan. Sementara jenis pakan yang digunakan adalah pakan komersial tenggelam dan pakan mandiri. Dengan lama pembesaran hingga 120 hari maka siklus pembesaran per tahun mencapai sebanyak 2 (dua) kali.

Penyedia Pakan dan Pakan Mandiri

Pemberian pakan merupakan salah satu unsur penting dalam proses budidaya ikan. Pembudidaya yang ada di Desa Koto Masjid telah menerapkan konsep yang baik dalam proses pemberian pakan dimana hampir 90 persen pakan telah menggunakan pakan mandiri.

Salah satu faktor dalam merealisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik budidaya adalah pengembangan pakan mandiri yang dikelola oleh masyarakat dimana segala aspek yang berhubungan dengan proses hulu-hilir pembuatan pakan dilakukan oleh masyarakat. Pakan ikan mandiri sendiri menjadi salah satu aspek yang dapat menekan biaya operasional budidaya. Desa Koto Masjid telah memiliki 32 Unit Pakan Mandiri yang dikelola oleh masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Pakan Mandiri	Kapasitas Produksi (Kg)/Bulan	Transportasi Bahan Baku	Sumber Bahan Baku	Kandungan Pakan	Pemasaran
1	35	500.000-600.000	Mobil	Sumatera Barat Sumatera Utara	10-22% Protein	Kecamatan XIII Koto Kampar

sumber: Dinas Perikanan 2023

Tabel 5. Data pakan budidaya ikan patin Desa Koto Masjid

Usaha Pengolahan dan Pemasaran

Usaha pengolahan pasca panen merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi faktor penting dalam konsep hulu-hilir kegiatan Perikanan Budidaya. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi tangkap maupun budidaya perikanan diperlukan proses pengolahan untuk menghasilkan suatu produk yang baru dan bisa dipasarkan. Dalam melakukan inovasi pengolahan hasil perikanan, para pelaku usaha dituntut agar memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan agar produk olahannya diterima dan dapat dipasarkan secara luas.

Usaha pengolahan dan pemasaran di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar merupakan salah satu kelompok yang mengolah ikan segar menjadi beberapa macam produk olahan ikan seperti ikan salai patin, nugget ikan patin, kerupuk kulit ikan patin, bakso ikan patin, abon ikan patin dan puding ikan patin. Dari beberapa produk tersebut yang menjadi produk andalan adalah ikan salai patin dikarenakan permintaan pasar yang cukup tinggi.

Pada awalnya pemasaran hasil produk olahan perikanan dipasarkan di pasar lokal yaitu di Kabupaten Kampar. Untuk memperluas akses pasar, mereka selalu mengikuti pameran produk

baik tingkat daerah maupun tingkat nasional, meningkatkan promosi lokal mereka dengan membuat jaringan penjual, melakukan kerjasama dengan asosiasi dan melakukan audiensi dengan instansi terkait. Dengan strategi-strategi tersebut, mereka berhasil meningkatkan jumlah produksi dari tahun ke tahun. Selain pasar lokal, mereka sudah memasarkan produk mereka ke luar Kabupaten Kampar, seperti Pekanbaru, Kuantan Singingngi, Dumai, Rokan Hilir dan luar Provinsi Riau seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Batam.

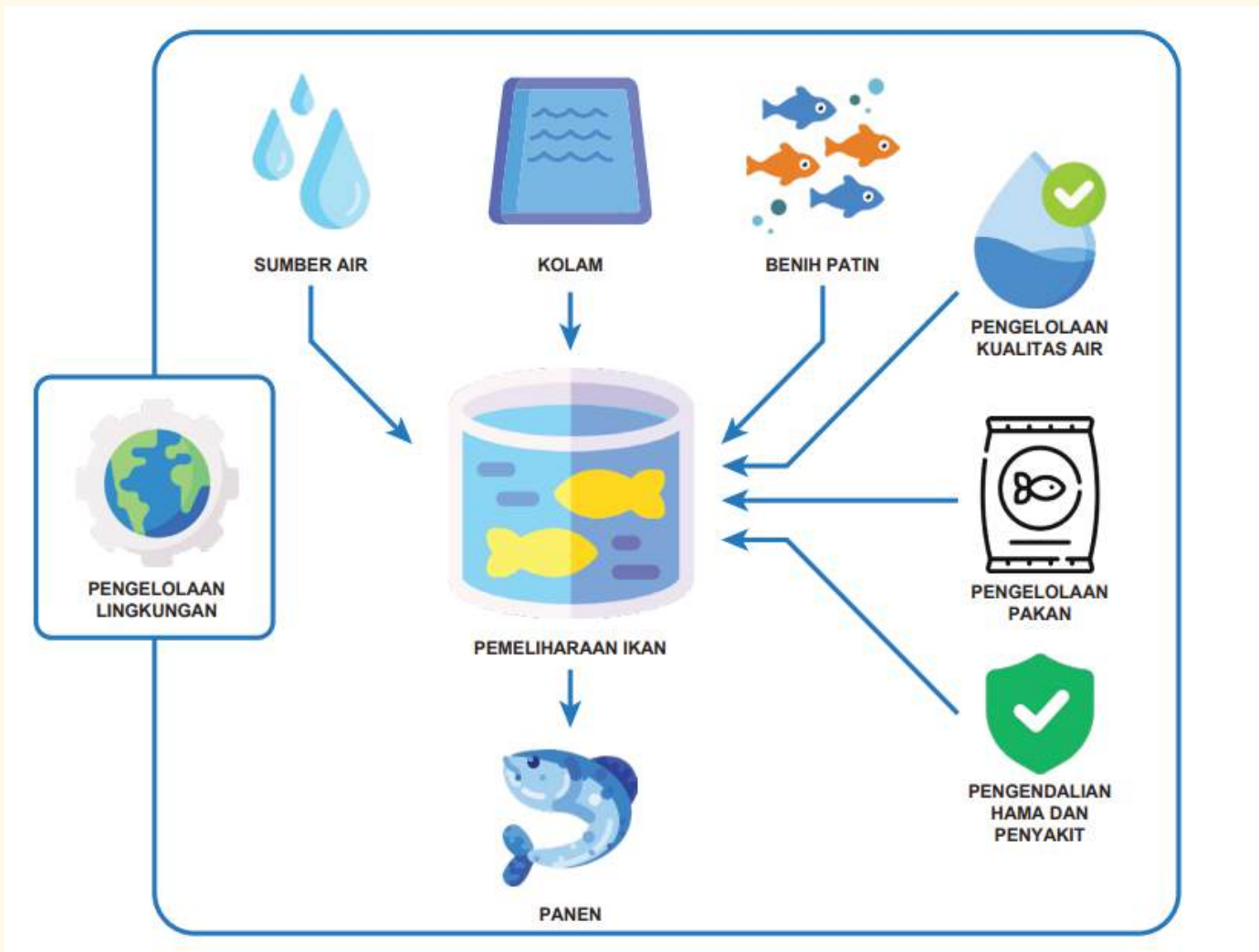
3. Akses Permodalan

Selama ini pembudidaya mendapat akses permodalan keuangan dari lembaga permodalan seperti, bank, koperasi, Lembaga Peminjam Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Selain itu untuk usaha budidaya, hasil pinjaman modal juga banyak yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga mereka

lembaga lainnya. Besaran modal yang dipinjam kepada pembudidaya rata-rata mulai dari Rp100.000.000 hingga Rp500.000.000 dengan rata-rata pengeluaran per rumah tangga sebesar Rp5.000.000.

D. TAHAPAN OPERASIONAL

Program ini sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) budidaya ikan yang telah terdokumentasi dengan baik. Dalam dokumen tersebut dijelaskan mulai dari penjelasan alur proses budidaya, cara mempersiapkan kolam, mempersiapkan sumber air, memilih benih ikan patin yang baik, pemeliharaan ikan, prosedur panen dan pasca panen, langkah pencegahan penyakit, teknik *monitoring* (dokumentasi), hingga pengelolaan lingkungan dan limbah. Berikut penjelasan masing-masing tahapan prosedur operasional budidaya ikan patin.



Gambar 14. Alur proses teknis budidaya ikan patin

Alur Budidaya Ikan Patin

- Sumber air: Kualitas air yang baik harus dipastikan dan jika perlu dilakukan perlakuan untuk meningkatkan kualitasnya.
- Persiapan kolam: Kolam harus dibersihkan dan dikapur sebelum digunakan.
- Benih: Benih yang digunakan harus berasal dari unit pembenihan bersertifikat.
- Pemeliharaan ikan: Fokus pada pengelolaan kualitas air dan pakan, serta pengelolaan kesehatan ikan.

- Panen dan pasca-panen: Meliputi persiapan peralatan panen, pengelolaan hasil panen, dan kebersihan.

Setelah memahami gambaran umum alur budidaya ikan patin, kini saatnya melihat lebih detail setiap tahapannya. Mulai dari pengelolaan sumber air hingga proses pengolahan produk turunan, masing-masing langkah memiliki peran penting untuk memastikan keberhasilan budidaya yang optimal. Berikut adalah penjelasan detail tentang cara budidaya ikan patin pada tiap tahapannya.

1. Pengelolaan Kualitas Air dan Pakan:

- Pengelolaan air dilakukan dengan memantau kualitas air secara rutin. Jika perlu, dilakukan penambahan probiotik untuk menjaga kondisi air.
- Pakan diberikan dua kali sehari dan disimpan di gudang yang kering serta berventilasi.

2. Pengecekan dan Pencegahan Penyakit:

- Pengamatan visual untuk kesehatan ikan dilakukan setiap hari. Jika ditemukan ikan sakit atau mati, dilakukan tindakan pencegahan.
- Biosekuriti diterapkan untuk mencegah kontaminasi dari luar, termasuk kebersihan peralatan dan pemagaran kolam.

3. Dokumentasi:

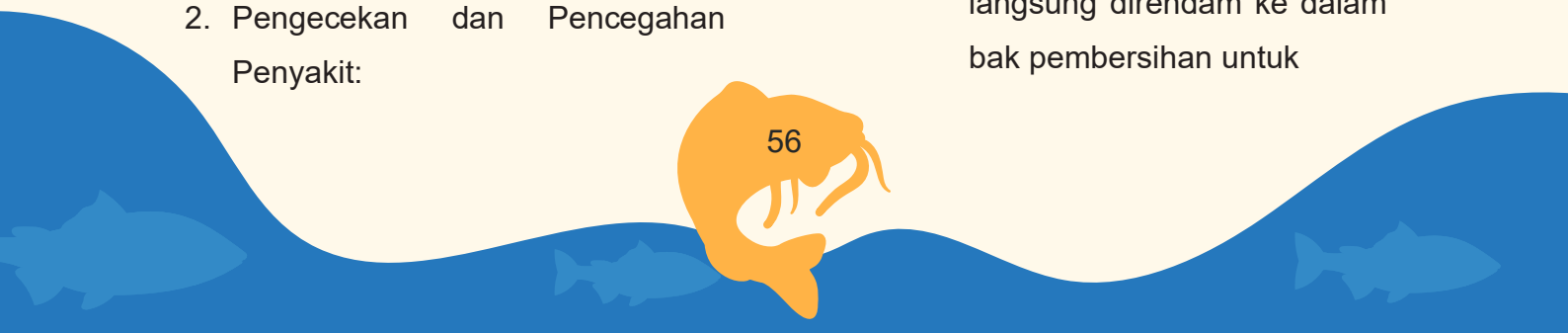
- Pencatatan setiap kegiatan, termasuk kualitas air, jumlah benih, penggunaan pakan, dan hasil panen.

4. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah:

- Limbah budidaya baik cair maupun padat harus dikelola dengan baik untuk menjaga lingkungan.

5. Proses Hilirisasi Ikan Patin Salai:

- Penangkapan ikan dikolam, langsung dibawa ke tempat pengasapan
- Penyiangan/pembersihan ikan, pembuangan jeroan langsung direndam ke dalam bak pembersihan untuk



membersihkan darah ikan dengan jangka waktu 20 menit - 30 menit

- Penyusunan ikan di pare-pare.
- Setelah penyusunan langsung dilakukan pengasapan tahap 1, guna untuk pengeringan air dengan waktu 4 jam.
- Pengulangan penyusunan ikan-ikan yang sudah melalui pengasapan tahap 1 dengan disusun berdempetan.
- Pengasapan tahap ke 2 selama 4 jam, guna untuk mengeringkan lemak/ minyak yang ada pada ikan.
- Siap untuk dikemas

Monitoring dan evaluasi (monev)

Monitoring dan evaluasi (monev) menjadi salah satu aspek kunci dalam menjamin keberhasilan program budidaya ikan patin di Kabupaten Kampar. Untuk mendukung pelaksanaan monev ini, penyuluh perikanan rutin melakukan kunjungan ke setiap kelompok pembudidaya. Kunjungan ini bertujuan untuk mendata kondisi lapangan, termasuk perkembangan kolam, pertumbuhan ikan, dan

permasalahan yang dihadapi para pembudidaya. Dengan adanya laporan bulanan dari penyuluh, perkembangan setiap kelompok dapat dipantau secara terperinci, sehingga tindakan korektif dapat segera diambil apabila ditemukan kendala yang menghambat produksi.

Selain memantau teknis budidaya, penyuluh juga berperan dalam monitoring penggunaan anggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta DAK (Dana Alokasi Khusus). Bantuan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya, seperti bibit ikan, pakan, dan peralatan, diawasi ketat untuk memastikan penggunaan yang tepat sasaran. Penyuluh memantau bagaimana bantuan tersebut dimanfaatkan dan apakah sesuai dengan kebutuhan kelompok untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan patin. Dengan pengawasan ini, anggaran dapat dikelola dengan baik dan sesuai peruntukan.

Semua data dan temuan di lapangan, baik terkait perkembangan teknis maupun penggunaan anggaran, kemudian dilaporkan oleh penyuluh kepada Dinas Perikanan. Laporan ini menjadi acuan penting dalam proses evaluasi program secara menyeluruh. Dinas Perikanan dapat menggunakan laporan ini untuk menilai efektivitas program dan menentukan langkah-langkah perbaikan, jika diperlukan. Dengan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terstruktur serta berkelanjutan, program budidaya ikan patin di Kabupaten Kampar dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan, sekaligus mendukung pencapaian target produksi yang diharapkan.

E. DUKUNGAN REGULASI

Dukungan regulasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam program Kampung Budidaya Ikan Patin sangat kuat dan terstruktur. Salah satu dasar hukum penting yang menjadi pijakan adalah Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor Kep.32/Men/2010, yang menetapkan Kabupaten Kampar sebagai salah satu lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan di Indonesia. Penetapan ini menunjukkan bahwa Kampar memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya budidaya ikan patin, dan menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan perikanan terpadu.

Selanjutnya, dukungan regulasi tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar. Peraturan ini memastikan bahwa kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya perikanan, termasuk kampung budidaya ikan patin, telah diatur dan dilindungi secara legal. Dengan adanya rencana tata ruang yang jelas, pengembangan wilayah perikanan di Kampar dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan konflik penggunaan lahan.

Dalam jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar juga menunjukkan komitmennya melalui

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039. RPJMD ini menjadi peta jalan pengembangan sektor perikanan di Kampar, dengan fokus memajukan budidaya ikan patin sebagai salah satu sumber ekonomi utama bagi masyarakat. Dukungan ini mencakup penyediaan infrastruktur, pelatihan bagi pembudidaya, serta akses ke pasar yang lebih luas, sehingga diharapkan sektor perikanan di Kampar, khususnya budidaya ikan patin, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

F. ALOKASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Jumlah alokasi anggaran program Kampung Budidaya Ikan Patin di Desa Koto Masjid, Kabupaten Kampar berbeda-beda dan berasal dari beragam sumber sejak tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, hibah dari APBD sebesar Rp2.902.034.400 dan hibah DAK sebesar Rp3.517.262.900, ditambah dengan penunjang DAK sebesar Rp185.119.100, memberikan total DAK sebesar Rp

3.702.382.000. Ini menunjukkan bahwa alokasi dana pada tahun 2022 terutama bersumber dari hibah APBD dan DAK.

Pada tahun 2023, hibah dari APBD meningkat signifikan menjadi Rp 7.527.458.934. Sumber anggaran sepenuhnya berasal dari hibah APBD pada tahun tersebut. Sementara itu, pada tahun 2024, hibah APBD mencapai Rp 3.120.793.150 dan hibah DAK sebesar Rp 3.661.560.880. Selain itu, terdapat anggaran untuk rehabilitasi sarana prasarana BBI Sipungguk sebesar Rp 1.686.976.170 dan anggaran penunjang DAK sebesar Rp 281.501.950, sehingga total DAK untuk tahun 2024 tercatat mencapai Rp 5.630.039.000. Secara keseluruhan, dana untuk program ini bersumber dari kombinasi APBD dan DAK, dengan peningkatan alokasi di setiap tahunnya, khususnya untuk perbaikan infrastruktur dan dukungan operasional program budidaya ikan patin di desa tersebut.

BAGIAN VI PENUTUP

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi maupun di kabupaten/kota dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan perencanaan, penganggaran pembangunan yang efektif dan efisien serta memberikan manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Upaya Kementerian PPN/Bappenas melalui Penghargaan Pembangunan Daerah adalah salah satu upaya untuk mengajak daerah agar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya dikerjakan dengan baik. Kerja inovatif suatu daerah ke depan diharapkan dapat menuliskan dan mendokumentasikan kerja-kerja inovatifnya secara terstruktur dan mandiri. Hal ini penting guna mempromosikan kerja inovatif suatu daerah ke daerah lain di Indonesia. Kerja inovatif di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kampar di Provinsi Riau merupakan praktik baik dalam menjaga kemandirian pangan serta memfasilitasi akses peternak itik dan pembudidaya ikan patin untuk lebih sejahtera.

